

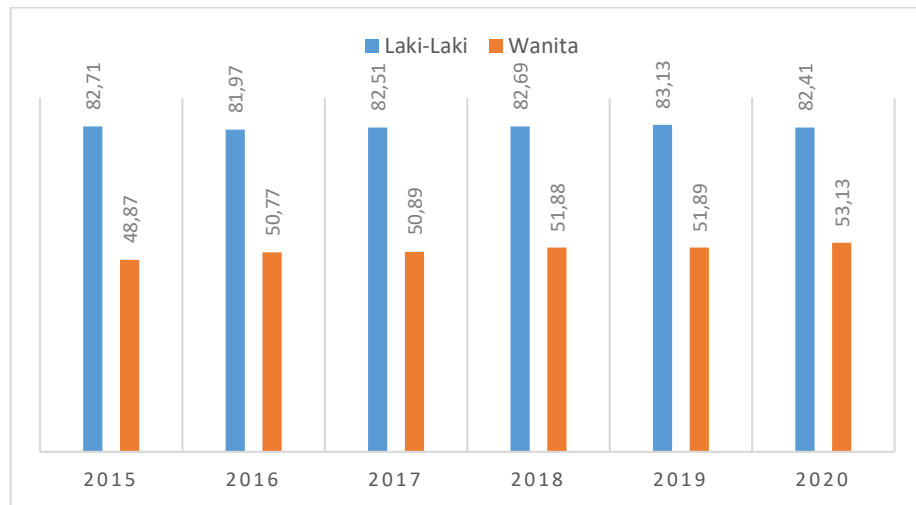
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu bangsa salah satunya adalah tenaga kerja. Ada juga penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah yang juga memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonominya. Sumber daya utama tenaga kerja sebagai subjek pembangunan adalah memiliki peran dalam melaksanakan dan menggerakkan pembangunan, menciptakan karakteristik tenaga kerja yang berdampak terhadap perekonomian. Oleh karenanya mengindikasikan pentingnya tenaga kerja pada capaian pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2012:332).

Peran tenaga kerja dalam perekonomian adalah dasar untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu potensi yang menguntungkan apabila diberdayakan secara efektif. Dalam bergabung dan mengambil bagian pada perekonomian, kesempatan yang sama seharusnya didapatkan antara pria dan wanita. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besaran penduduk usia produktif yang berpartisipasi dalam perekonomian. TPAK adalah komparasi dari jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Seperti terlihat pada Gambar 1.1, di Indonesia tingkat partisipasi angkatan kerja didominasi oleh laki-laki yang mana selama lima tahun terakhir nilainya selalu berada diatas 80 persen, sedangkan wanita hanya sekitar setengahnya dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015 menjadi 48,87 persen.



Gambar 1.1

TPAK Laki-laki dan Wanita di Indonesia (persen), tahun 2015-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Salah satu penyebab ketimpangan dalam TPAK adalah ketimpangan gender. Disekuilibrium gender terjadi sebagai akibat dari perubahan secara sosial yang menuju pada batasan antar gender (Badan Pusat Statistik, 2018). Pada negara berkembang, kerap terjadi ketidakseimbangan antara pria dan wanita (Verick, 2014). *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyantumkan kesepadanan gender guna menghapus diskriminasi yang terjadi kepada wanita. Persoalan terkait gender terkandung dalam poin 5, yang mencakup jaminan partisipasi penuh dan peluang yang setara bagi wanita di semua tingkat penetapan keputusan dalam aktivitas politik, ekonomi, dan sosial (Badan Pusat Statistik, 2018).

Semakin berkembangnya zaman, partisipasi wanita dalam politik juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur partisipasi wanita dalam perekonomian. Negara yang memiliki ciri tingginya partisipasi wanita dalam politik ada kecenderungan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (Lv & Yang, 2018). Dengan menduduki posisi legislatif dan eksekutif di seluruh dunia, wanita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kompetensi dan keahlian politiknya. Representasi politik wanita yang meningkat terbukti meningkatkan status konstituen wanita. Wanita dalam posisi kepemimpinan telah lama dianggap berpotensi membuka jalan bagi perubahan jangka panjang dengan mempengaruhi

aspirasi. Politisi wanita dapat mengungkap bias gender, mempromosikan kebijakan yang meringankan hambatan formal dan informal untuk lebih jauh keterlibatan wanita dan memberikan teladan bagi generasi wanita saat ini dan masa depan (Hessami & da Fonseca, 2020).

Indonesia telah membuat undang-undang yang memuat keterlibatan wanita dalam politik yaitu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan Pemilihan Umum memberi dorongan agar terwujudnya tindakan affirmative dalam rangka meningkatkan peran wanita di bidang partai politik. Ditentukan 30 persen pengurus partai politik di seluruh tingkat harus diisi wanita dan dari 30 persen calon anggota legislatif juga diisi oleh wanita. UU ini lahir dikarenakan porsi yang tidak setara laki-laki dan wanita dalam ranah publik khususnya politik.

Indonesia menempati urutan ke-7 se Asia Tenggara dalam hal keterwakilan wanita dalam parlemen. Timor Leste menempati urutan pertama sebagai negara dengan keterwakilan wanita dalam parlemen tertinggi di Asia Tenggara, urutan kedua adalah negara Filipina, disusul dengan Laos, Vietnam, Singapura, Kamboja, Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam di urutan terakhir. Minimnya keterwakilan wanita di parlemen berdampak pada isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan gagal menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi wanita.

Pendidikan memang menjadi isu penting bagi TPAK wanita, diklaim bahwasannya diskriminasi terhadap wanita tidak sekedar menghambat pendidikan tetapi ketidakseimbangan sosial juga. Ini berarti bahwa penting untuk tidak mendiskriminasi dalam pendidikannya, terutama untuk wanita (Todaro, M., & Smith, 2011). Wanita yang memilih bergabung dalam kegiatan perekonomian ialah wanita dengan pendidikan rendah, dengan alasan pendidikan yang rendah pada wanita mayoritas berasal dari rumah ekonomi yang kurang sehingga secara aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu ekonomi keluarga (Pratomo, 2017). Apabila wanita merupakan kaum yang berpendidikan, mereka mempunyai hak kepemilikan dan memilih berkarir dan mendapatkan penghasilan. Hal ini

membuktikan bahwa diskriminasi terhadap wanita telah berkurang (Herlina, 2016). Wanita dengan pendidikan terakhir SMA secara umum kurang berperan dalam pasar tenaga kerja, karena melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan wanita dengan pendidikan terakhir di bawah SMA cenderung akan memasuki pasar tenaga kerja, tidak sedikit dari mereka yang menjadi pekerja kasar, dikarenakan ketidakmampuan bersaing dalam pasar tenaga kerja apabila dibandingkan dengan lulusan SMA atau kejuruan.

Angka Melek Huruf merupakan suatu penanda yang dipergunakan untuk mengevaluasi kemajuan pendidikan di suatu negara. Peningkatan angka melek huruf akan meningkatkan kualitas SDM suatu negara. Dengan peningkatan angka melek huruf, wanita akan memiliki lebih banyak akses untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di pasar tenaga kerja. Hal ini kemudian akan meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat (Ince, 2010).

Tingkat kesehatan wanita juga cenderung berpengaruh terhadap TPAK Wanita. Tingkat kesehatan wanita dicerminkan oleh angka harapan hidup wanita. Dengan asumsi bahwa angka harapan hidup bertambah akan meningkatkan tingkat kesehatan yang berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Angka harapan hidup wanita merupakan salah satu indikator yang menghitung tingkat kesehatan wanita, dimana tingkat kesehatan wanita mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja wanita. Angka harapan hidup wanita yang tinggi mengartikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanita juga akan tinggi. (Osundina, 2019).

Terdapat beberapa faktor penyebab wanita memutuskan bekerja ataupun tidak bekerja, seperti status pernikahan, status kepala keluarga, dan jumlah keluarga (Tsaniyah & Sugiharti, 2021). Pada saat seseorang terikat status menikah akan menambah kesempatan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja yang kemudian mendapatkan penghasilan untuk keperluan rumah tangga (Doğrul, 2012). Setelah menikah wanita menjalankan perannya sebagai seorang ibu dan istri. Sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga cenderung menghabiskan waktunya untuk bekerja. Bagi wanita yang telah menikah, memilih bekerja diluar rumah akan menghasilkan konsekuensi adanya peran ganda, yaitu menjadi seorang ibu ketika berada didalam

rumah, dan menjalankan tanggung jawabnya ketika sedang bekerja. Wanita yang berpartisipasi dalam angkatan kerja dapat membekali diri mereka dari urgensi finansial apabila terjadi perceraian. Hal lain yang mempengaruhi wanita untuk bekerja adalah wanita dengan status perkawinan bercerai, wanita dengan status perkawinan bercerai memiliki peluang yang tinggi untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Upah adalah tolak ukur seseorang untuk memasuki pasar tenaga kerja. Jika upah yang ditawarkan tinggi, tidak menutup kemungkinan bagi wanita untuk memasuki pasar kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja wanita akan meningkat (Tsani et al., 2013). Upah merupakan sesuatu yang mempengaruhi laju investasi tenaga kerja wanita, namun bagi wanita yang sudah menikah dan berkeluarga cenderung bekerja dengan persyaratan yang lebih ringan dan tidak terlalu mengkhawatirkan upah. Karena wanita yang sudah menikah memilih bekerja dengan upah kecil daripada berdiam diri tidak menghasilkan apapun (Herlina, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, masih terdapat kesenjangan pada TPAK antara pria dan wanita karena wanita kurang diberdayakan dalam pembangunan. Pemberdayaan wanita merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti aspek politik, pendidikan, kesehatan, status perkawinan, dan upah wanita. Berdasarkan salah satu aspek yaitu indikator pendidikan wanita terdapat kesenjangan apabila dibandingkan dengan pria. Dan aspek lainnya seperti politik, kesehatan, status perkawinan, dan upah wanita juga penting dalam mempengaruhi percepatan pembangunan, sehingga diperlukan penelitian tentang TPAK Wanita di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian dari (Lv & Yang, 2018) yang menyatakan bahwa partisipasi politik wanita, pendidikan wanita, dan status perkawinan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Penelitian ini mencoba untuk melengkapi penelitian terdahulu dari (Tsani et al., 2013), (Verick, 2014), (Aboohamidi & Chidmi, 2013). Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terdapat pada wilayah observasi, variabel penelitian, dan periode penelitian lebih baru.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan antara lain partisipasi politik wanita, pendidikan wanita sekolah menengah dan perguruan tinggi, angka melek huruf, angka harapan hidup, status perkawinan, dan upah wanita. Wilayah observasi meliputi 34 Provinsi Indonesia dengan periode data tahun 2015-2020 dan data yang bersumber dari BPS. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membuat kebijakan yang mengurangi kesenjangan terhadap wanita dan memberdayakan wanita.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh partisipasi politik wanita, tingkat pendidikan wanita, angka melek huruf wanita, angka harapan hidup wanita, status perkawinan, dan upah wanita terhadap TPAK Wanita di Indonesia tahun 2015-2020.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan variabel yang digunakan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja wanita sebagai variabel dependen, dan variabel independen yang terdiri dari partisipasi politik wanita, tingkat pendidikan wanita, angka melek huruf wanita, angka harapan hidup wanita, status perkawinan, dan upah wanita. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan periode 2015-2020 di 34 provinsi di Indonesia yang kemudian diolah dengan *software* Eviews10.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan variabel Pendidikan Wanita Perguruan Tinggi memiliki koefisien sebesar 0,274 dan nilai probabilitas 0,0020, dan Upah wanita memiliki koefisien sebesar 5,407 dan nilai probabilitas 0,0069 berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia. Variabel Angka Melek Huruf memiliki koefisien -0,611 dan nilai probabilitas 0,020 dan Status Perkawinan memiliki koefisien -0,674 dan nilai probabilitas 0,0389

berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia. Sedangkan variabel Partisipasi Politik Wanita memiliki koefisien $-0,043$ dengan nilai probabilitas $0,4387$, Pendidikan Wanita Sekolah Menengah memiliki koefisien $0,885$ dengan nilai probabilitas $0,2898$, dan Angka Harapan Hidup memiliki koefisien $21,554$ dengan nilai probabilitas $0,622$ tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pendidikan, pendapatan, dan status perkawinan.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap TPAK Wanita di Indonesia yaitu partisipasi politik wanita, pendidikan wanita, angka melek huruf, angka harapan hidup, status perkawinan, dan upah wanita. Selain itu dapat dijadikan referensi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan guna mengurangi ketimpangan gender dan pemberdayaan wanita.

1.7 Sistematika Penelitian

Tahapan penulisan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, kerangka pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN